

NATION AND CHARACTER BUILDING SEBAGAI INSTRUMEN PEREKAT WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

Rasyidin¹⁾

¹⁾Dosen FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

ABSTRAK

Sesuai dengan situasi globalisasi yang memunculkan berbagai paham baik di bidang politik, social, budaya, ekonomi dan hukum. Keadaan tersebut menghantam keutuhan dan kebangsaan di berbagai Negara termasuk Negara republic Indonesia. Hal ini sangat mungkin bisa terjadi apabila empat pilar kebangsaan-kenegaraan (UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) sudah mulai memudar dikalangan warganegara khususnya generasi muda sebagai pewaris Negara ini. Nation and character building sangat diperlukan saat ini, tujuan utamanya adalah untuk merawat dan menjaga empat pilar tersebut berbagai aspek perekat wawasan kebangsaan, strategi yang perlu ditempuh adalah penguatan aspek politik khususnya penguatan kapabilitas sistem politik, memanfaatkan kearifan local, peninjauan kembali sistem pendidikan nasional dengan merevisi kurikulum, menetapkan pelajaran tersebut sebagai mata pelajaran inti dan memasukkan materi ajar seperti Civic Education, pendidikan budi pekerti dan pendidikan agama perlu ditambah jam pelajarannya disemua jenjang pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi. Di samping itu, sosialisasi empat pilar kebangsaan dan kenegaraan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan, dengan melibatkan berbagai elemen bangsa seperti para akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh agama dan adat supaya lebih efektif dan efesien, usaha-usaha tersebut merupakan perekat kebangsaan seperti yang dijalankan pada waktu-waktu yang lampau.

Key word : Nation and Character Building, wawasan kebangsaan

1. Pendahuluan

Perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia sudah sangat menguatirkan, bahkan, kekuatiran itu menjadi semakin nyata ketika menjelajah pada apa yang dialami oleh setiap warganegara, yakni memudarnya wawasan kebangsaan. Dengan demikian yang lebih

menyedihkan lagi adalah kita kehilangan wawasan tentang makna hakekat bangsa dan kebangsaan yang akan mendorong terjadinya disorientasi, distegrasi dan perpecahan.

Pernyataan tersebut di atas sangat wajar dan tidak mengada-ada. krisis yang dialami oleh Indonesia ini menjadi sangat multi dimensional yang saling berkaitan. Berangkat dari Krisis ekonomi yang tidak

kunjung henti berdampak pada krisis sosial dan politik dan krisis-krisis lain. Konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis tersebut, akhirnya bermuara dan melahirkan ancaman disintegrasi bangsa. Apalagi bila melihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai pandangan politik. serta kondisi geografisnya. Semua ini mengandung potensi konflik (*latent social conflict*) yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketika kita membicarakan kesatuan dan persatuan terdapat sebuah pertanyaan dalam benak dan nurani kita sebagai sebuah komunitas, pertanyaannya adalah "*masih banggakah kita sebagai bangsa Indonesia?*". Walaupun reformasi telah memperoleh berbagai keberhasilan sehingga telah mampu mendorong ke arah yang lebih baik dan lebih mapn, seperti transparan dan demokratisasi sesuai dengan data dan fakta empiris. Di balik keberhasilan reformasi tersebut, telah muncul problema baru yaitu longkarnya paham kebangsaan yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat kita lihat dengan munculnya persoalan-persoalan yang menghantam kesatuan dan persatuan mulai dari ancaman terhadap keamanan individu, radikalisme agama korupsi yang terjadi diberbagai lembaga negara, penegakan hukum yang belum sepenuhnya menganut prinsip keadilan, desentralisasi yang cenderung terimplementasi dalam federalisasi maupun kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tidak dapat segera diatasi secara signifikan.

Upaya untuk memelihara kebangsaan Indonesia sekaligus mewujudkan suasana aman, tertib dan sejahtera dalam keberagaman masyarakat Indonesia memang tidak semudah membalik telapak tangan. Belum ada satupun teori yang dapat secara tepat digunakan untuk diterapkan di Indonesia, sebuah negeri yang demikian besar, yang di dalamnya terdapat lebih dari 300 (tiga ratus) etnis dengan lebih dari 384 (tiga ratus delapan puluh empat) bahasa yang tersebar dalam 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) pulau yang terangkai dari Sabang sampai Merauke dan terwadahi dalam administrasi pemerintahan pada 530 (lima ratus tiga puluh) daerah otonom yang

terbagi dalam 497 (empat ratus Sembilan puluh tujuh) kabupaten/kota dan 34 (tiga puluh empat) provinsi (Kemendagri, 2011).

Dewasa ini, dampak krisis multi-dimensional ini telah memperlihatkan tanda-tanda awal munculnya krisis kepercayaan diri (*self-confidence*) dan rasa hormat diri (*self-esteem*) sebagai bangsa. Krisis kepercayaan sebagai bangsa dapat berupa keraguan terhadap kemampuan diri sebagai bangsa untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang terus-menerus datang, seolah-olah tidak ada habis-habisnya mendera bangsa Indonesia. Aspirasi politik untuk merdeka di berbagai daerah, misalnya, adalah salah satu manifestasi wujud krisis kepercayaan diri sebagai satu bangsa, satu "*nation*".

Krisis politik dan krisis ekonomi sudah berujung pada krisis kepercayaan diri, maka eksistensi Indonesia sebagai bangsa (*nation*) sedang dipertaruhkan. Sekarang ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan reevaluasi terhadap proses terbentuknya "*nation and character building*," karena boleh jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini berawal dari kesalahan dalam menghayati dan menerapkan konsep awal "kebangsaan" yang menjadi fondasi ke-Indonesia-an. Kesalahan inilah yang dapat menjerumuskan Indonesia, seperti yang ditakutkan oleh Sukarno, "*menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa.*" Bahkan, mungkin yang lebih buruk lagi dari kekuatiran Sukarno, "*menjadi bangsa penge-mis dan pengemis di antara bangsa-bangsa*".

Kita lihat saja, akhir-akhir ini permasalahan yang menimpa bangsa kita begitu kompleks dan datang bertubi-tubi. Mulai dari kasus Century, kasus Nazaruddin dan Gayus Tambunan, peledakan bom, konflik di Maluku dan Papua, kekerasan terhadap agama lain dan kelompok minoritas, maraknya ajaran sesat, tawuran antar pelajar dan antar kampung, krisis ekonomi, beberapa diantaranya belum bisa dituntaskan sampai hari ini. Hal ini menggambarkan betapa rapuh dan lemahnya karakter bangsa ini. Bertitik tolak dari kenyataan di atas, maka sudah saatnya pendidikan *character building* secara komprehensif digalakkan kembali. Sebab pendidikan *character building* adalah sangat signifikan untuk saat ini untuk memperbaiki kondisi bangsa yang demikian carut-marutnya. *Character building* yang dimaksud disini tidak sekedar seperti apa yang diajarkan di

sekolah maupun kampus saja, tapi meliputi berbagai aspek kehidupan dan berbagai elemen masyarakat yang ada.

Di samping itu, timbul pertanyaan yang sangat mengganggu pemikiran kita sebagai bangsa mengapa akhir-akhir ini wawasan kebangsaan menjadi banyak dipersoalkan. Apabila kita mendalaminya, menangkap berbagai sinyel dan ungkapan masyarakat pada tingkat *grass root*, terutama dari kalangan cendekiawan, akademisi dan pemuka masyarakat, mereka memandang ada tiga hal menjadi keprihatinan, yaitu :

1). adanya kesan seakan-akan semangat kebangsaan di Negara Republik Indonesia telah menjadi dangkal atau tererosi terutama di kalangan generasi muda-seringkali disebut bahwa sifat materialistik mengubah idealisme yang merupakan jiwa kebangsaan. 2) adanya kekuatiran ancaman disintegrasi kebangsaan, dengan melihat gejala yang terjadi di berbagai negara, terutama yang amat mencekam adalah perpecahan di Eropah Timur Uni Soviet, dan juga di negara-negara lainnya seperti di Afrika, dimana paham kebangsaan mereka merosot secara tajam menjadi paham kesukuan atau keagamaan. 3) keprihatinan tentang adanya upaya untuk melarutkan pandangan hidup bangsa ke dalam pola pikir asing untuk bangsa ini, aspek globalisasi dan *Melimum Development Goals (MDG)* selalu mengarahkan kepada pemikiran global.

Ketiga keprihatinan tersebut di atas, mesti diminimalisirkan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan sehingga kekuatiran demi kekuatiran dapat diatasi, maka kekuatan kebangsaan menjadi lebih kuat dan tidak timbul masalah baru dalam Negara.

2. Konteks Aktual

Para *founding fathers* memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan umum adalah mengubah sistem feodalistik dan sistem kolonialis menjadi sistem modern dan sistem demokrasi.) Kemerdekaan menurut Sukarno adalah "*jembatan emas*" menuju cita-cita demokrasi, sedangkan pembentukan "*nation and character building*" dilakukan di dalam prosesnya. Kalau pada suatu saat Sukarno menyatakan bahwa, "*revolusi belum selesai*," maka dalam konteks "*nation and character building*," pernyataan demikian dapat dimengerti. Artinya, baik "*nation*"

maupun "*character*" yang dikehendaki sebagai bangsa merdeka belum mencapai standar yang dibutuhkan, maka dalam hubungan "*nation and character building*" seperti yang diuraikan di atas, beberapa gagasan yang mutlah dimiliki apabila melalukan *nation and character building* yaitu :

Pertama, Kemandirian (*self-reliance*), atau menurut istilah Presiden Soekarno adalah "Berdikari" (berdiri di atas kaki sendiri) atau istilah sekarang lebih dikenal dengan sebutan mandiri. Dalam konteks aktual saat ini, kemandirian diharapkan terwujud dan percaya akan kemampuan manusia dan penyelenggaraan Republik Indonesia dalam mengatasi krisis-krisis yang dihadapinya.

Kedua, Demokrasi (*democracy*), atau kedaulatan rakyat sebagai ganti sistem kolonialis. Masyarakat demokratis yang ingin dicapai adalah sebagai pengganti dari masyarakat warisan yang feodalistik. Masyarakat di mana setiap anggota ikut serta dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran negaranya.

Ketiga, Persatuan Nasional (*national unity*). Dalam konteks aktual dewasa ini diwujudkan dengan kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi nasional antar berbagai kelompok yang pernah berseteru ataupun terhadap kelompok yang telah mengalami diskriminasi.

Keempat, Martabat Internasional (*bargaining positions*). Indonesia tidak perlu mengorbankan martabat dan kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka untuk mendapatkan prestise, pengakuan dan wibawa di dunia internasional. Sikap menentang hegemoni suatu bangsa atas bangsa lain adalah sikap mendasari ide "*nation and character building*."

Bung Karno menentang segala bentuk "penghisapan suatu bangsa terhadap bangsa lain," serta menentang segala bentuk "neokolonialisme" dan "neoimperialisme." Indonesia harus berani mengatakan "tidak" terhadap tekanan politik yang tidak sesuai dengan "kepentingan nasional" dan "rasa keadilan" sebagai bangsa yang berdaulat.

3. Usaha Memperkokoh Persatuan Bangsa dan Kesatuan Negara

Instrumen perekat kebangsaan amat banyak di Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun perekat-perekat tersebut

belum mampu memberikan perawatan yang tangguh untuk tegaknya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Keadaan-keadaan tersebut dampaknya sangat mengkhawatirkan; melemahnya semangat nasionalisme. Rakyat mulai berfikir parsial dan bertindak radikal. Bagi yang tidak puas dengan pemerintah, lahir gerakan-gerakan disintegrasi yang mengancam keberlangsungan NKRI. Di sebagian wilayah muncul permintaan berpisah dengan Indonesia. Pada bagian lain, diduga akibat salah tafsir otonomi daerah, ego kedaerahan menguat. Meletuslah konflik berlatar belakang perbedaan etnis. Kasus lainnya, tuntutan pemekaran wilayah juga menjamur dan tak terkendali. Mulai dari pemekaran propinsi, kabupaten/kota dan bahkan sampai pada tingkatan pemekaran desa.

a. Sistem politik

Belakangan ini publik banyak membicarakan tentang 4 Pilar Kebangsaan. Sesuatu yang dulu sangat kuat mengakar sebelum tumbanganya Orde Baru, tetapi kemudian menjadi pembicaraan yang hilang-hilang timbul sejak bergulirnya reformasi, sejak tahun 1998. Empat pilar kebangsaan tersebut adalah *Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika* seperti yang terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR No. V tahun 2000).

Runtuhnya rezim orde baru (ORBA) telah melahirkan berbagai perubahan dalam kehidupan berkebangsaan di Indonesia, terutama dalam kebebasan mengemukakan pendapat. Rakyat yang dulu dibungkam dan mesti manut dengan setiap titah penguasa, bagai tumpahan air bah, tiba-tiba bebas membicarakan apa saja dan bahkan secara terbuka bisa melakukan penolakan-penolakan atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan keinginannya. Akibatnya, sepanjang reformasi politik yang bermula pada tahun 1998, negara-bangsa Indonesia selalu dipenuhi gagasan, wacana, gerakan, dan aksi dalam berbagai aktivitas baik politik, sosial, budaya dan hukum seolah-olah bertolak belakang dengan semangat keempat pilar tersebut.

Dampaknya sangat mengkhawatirkan; adalah melemahnya semangat nasionalisme. Rakyat mulai berfikir parsial dan bertindak radikal. Bagi yang tidak puas dengan peme-

rintah, lahir gerakan-gerakan disintegrasi yang mengancam keberlangsungan NKRI. Di sebagian wilayah muncul permintaan berpisah dengan Indonesia. Pada bagian lain, diduga akibat salah tafsir otonomi daerah, ego kedaerahan menguat. Meletuslah konflik berlatar belakang perbedaan etnis, kasus lainnya, tuntutan pemekaran wilayah juga menjamur dan tak terkendali. Mulai dari pemekaran propinsi, kabupaten/kota dan bahkan sampai pada tingkatan pemekaran gampong atau desa. Otonomi daerah merupakan desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi dalam sisi gelapnya juga merupakan ancaman yang serius terhadap Negara seperti yang diungkapkan oleh Leo Agustiono (2010).

Di bidang penegakan hukum, kita menyaksikan kebobrokan yang sedemikian rupa. Hukum yang dicitakan berlaku sama (*equal*) terhadap semua warga negara dan tidak pandang bulu sebagai esensi paham negara hukum (*rule of law*) sebagaimana diamanatkan konstitusi, masih terdapat penerapannya yang diskriminatif, tebang pilih dan lain sebagainya. Hukum bukan lagi memberi perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, hukum lebih terlihat berwajah keras terhadap mereka yang awam, dan amat ramah terhadap mereka yang mapan. Terpidana dari kelas atas menikmati fasilitas penuh kemewahan.

Sistem politik memegang peranan yang sangat penting dalam merawat ketahanan nasional dan menjaga keutuhan Negara. Setiap Negara memiliki sistem politiknya termasuk Negara Republik Indonesia, sistem politik dapat ditamsilkan seperti urat nadi yang merupakan saluran darah untuk kelangsungan berbangsa dan bernegara yang menghantar rakyatnya dalam kehidupan yang sejahtera baik moril maupun materil. Menurut Diah Wardani dalam A. Rahman Ali (2007 : VIII) dinyatakan bahwa fungsi sistem politik yang sehat dan sejahtera tertumpu harapan yang besar dari bangsa dan Negara untuk mengartikulasi aliran darah bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai bahwa fungsi sistem politik yang sehat dan sejahtera tertumpu harapan yang besar dari bangsa dan Negara untuk mengartikulasi aliran darah bagi tumbuh dan berkembangnya berbagai aspek aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek tersebut meliputi aspek ideologi, aspek pendidikan,

politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam serta kearifan lokal. Tumbuh dan berkembangnya aspek tersebut memberikan nilai tambah bagi sistem politik dalam dan membangun infrastruktur politik dan supra-struktur politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila hal tersebut berjalang seimbang maka dengan mudah dapat dicapai tujuan Negara sesuai dengan apa yang termaktuk dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea IV.

Kapabilitas sistem politik memegang peranan penting dalam merawat 4 pilar kenegaraan, apabila apabilitas-kapabilitas tersebut dijalakan secara konsekwen, maka ancaman terhadap disintegrasi, radikalisme, tuntutan-tuntutan lain yang menyerang keutuhan bangsa dapat diminimalisir secara signifikan. Menurut Budi Irawan Maksudi (2011 : 299) keberhasilan sebuah sistem politik dalam menghadapi berbagai tantangan baik dari luar maupun dari dalam sangat tergantung pada kemampuan (kappa-bilitas) sistem politiknya. Oleh karena itu David Easton dan Gabriel Almond menyatakan didalam sistem politik sebuah Negara mempunyai fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat ke dalam maupun ke luar, Ini berarti ketika lingkungan mengalami berbagai perubahan yang signifikan.

b. Aspek Kearifan lokal

Istilah kearifan lokal (*lokal wisdom*) (kearifan lokal) mempunyai arti yang sangat mendalam dan menjadi suatu kosa kata yang sedang familiar di telinga kita akhir-akhir ini. Banyak ungkapan dan perilaku yang bermuatan nilai luhur, penuh kearifan, muncul di komunitas lokal sebagai upaya dalam menyikapi permasalahan kehidupan yang dapat dipastikan akan dialami oleh masyarakat tersebut. Realita ini muncul ke permukaan karena tidak adanya solusi global yang dapat membantu memberikan jawaban terhadap segala kejadian yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka.

Kearifan lokal adalah budaya luhur yang diciptakan nenek moyang lewat sebuah pengalaman yang akhirnya menjadi sebuah pola-pola tertentu dan kaidah. Walaupun kearifan lokal bukanlah sebuah pengetahuan, namun menjadi sumber ilmu pengetahuan modern dengan diciptakan teori dan dalil-dalil yang dapat dirumuskan dan dihitung secara logika.

Salah satu kearifan lokal di provinsi Aceh adalah syariaat Islam, adat istiadat, gotong royong dan kesenian atau tarian Saman atau seudati. Apabila kesenian Aceh digunakan secara maksimal dalam mewujudkan silaturrahi dalam berbagai aktivitas ini juga sebagai perekat kebangsaan.

c. Aspek Pendidikan

Kita harus menyadari bahwa lembaga pendidikan merupakan lokus terpenting dalam penanaman dan penguatan semangat kebangsaan keindonesiaan, hal ini sangat sesuai dengan yang ditegaskan oleh Bung Karno yaitu pendidikan merupakan lokus yang paling utama dalam *nation and character building*. Setelah menempuh era reformasi dan demokratisasi membuat nyaris padamnya transmisi pengetahuan terutama yang berkaitan dengan keempat pilar dalam kehidupan kebangsaan-kenegaraan. Mata pelajaran yang khusus untuk pembentukan character kebangsaan pada masa sekarang tidak lagi diajarkan kepada peserta didik sejak dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi, seperti *Civic Education*, *budi pekerti*

Keadaan tersebut diperparah lagi dengan kondisi para guru dan dosen sejak era 1990 an tidak dibekali lagi dengan pengetahuan/penguatan pahan kebangsaan kenegaraan tersebut. Kalaupun mereka mendapatkannya hanya pada saat mereka mengikuti prajabatan saja, itupu hanya selintas saja. Setelah itu mereka tidak lagi bersentuhan dengan keempat pilar tersebut, akibatnya mereka dengan mudah tergoda dan tertarik pada paham dan ideology yang lain, dan bukan tidak mungkin mereka ajarkan kepada pelajar dan mahasiswa mereka (Azyumardi Azra, 2011).

Pengaruh ini dapat diduga. Para pelajar dan mahasiswa tidak lagi menerima bahan pembelajaran mereka mengenai empat pilar tersebut, sehingga prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin lama semakin jauh dari para peserta didik. Bahkan keempat pilat tersebut sudah mulai pudar dalam pikiran dan ingatan mereka. Jika mereka tidak mengenal/ mengetahui lagi tentang empat pilar dimaksud, bagaimana mereka dapat berkomitmen kepada Negara ini. Akibat dari mengikisnya rasa kebangsaan, para pelajar dan mahasiswa sngat rawan, rentan dan mudah terjerumus menjadi pengikut kepada paham

dan ideology yang bertentangan dengan ke empat pilar kebangsaan tersebut. Hal ini diperkuat lagi dengan terbukanya alam maya yang bebas, sehingga mereka mendapatkan berbagai ideology yang instan yang disuguhkan oleh dunia maya, ideology-ideologi yang instan itu dengan mudah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat di Negara ini. Dengan demikian mereka dengan mudah mengikuti berbagai ideology instan radikalisme dan anarkisme.

Melihat perkembangan seperti diuraikan di atas, maka sudah saatnya pemerintah menganbil langkah-langkah kongkret ke arah revitalisasi dan sosialisasi kembali ke empat kebangsaan-kenegaraan dengan melibatkan berbagai komponen bangsa seperti kaum akademisi, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, para alim ulama, pemuka masyarakat dan lain-lain. Apabila perintah membiarkan kondisi ini seperti sekarang ini, maka pengikisan kesadaran tentang kebangsaan-kenegaraan serta keindonesiaan terus terkikis, secara otomatis disintegrasi bangsa semakin subur di Negara tercinta ini.

Reintroduksi pengetahuan mengenai keempat pilar itu dalam kurikulum sejak dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi perlu dipertimbangkan kembali dan segera diaturkan berbagai persiapan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI perlu mengambil langkah *affirmative action* mengenai hal ini. Hal yang lebih penting adalah secara substantive dan metodologis, sosialisasi keempat pilar melalui institusi pendidikan mutlak perlu dilakukan untuk menyelamatkan bangsa ini secara signifikan (Depdikbud R.I)

Pendidikan *Citizenship Education* (kewarganegaraan) menjadi urutan penting dalam menjaga pilar kebangsaan dan kenegaraan, karena perubahan-perubahan yang terjadi sekarang amat cepat apalagi dipengaruhi oleh arus globalisasi. Untuk menyimbangani arus tersebut perlu disiapkan pendidikan yang mampu membentuk warganegara yang tangguh dalam menerima berbagai pengaruh dari luar. Salah satu unsure yang paling penting adalah bertanggungjawab dalam bidang penyiapan warganegara nya untuk merawat nasionalismenya di bidang persatuan dan kesatuan bangsa. Isu global tidak dapat pisahkan dan menjadi bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan dewasa ini. Mengikuti pernyataan yang dikemukakan oleh Cogan dan Derricot

(1998) bahwa,"that current modes of educating for citizenship will not be sufficient as we enter a new century. They require that citizen be able to focus upon many diverse elements, issues and contexts simultaneously" (konsep pendidikan kewarganegaraan sekarang ini dianggap tidak cukup bagi warga Negara dalam menghadapi abad baru. Warga Negara memerlukan kemampuan menanggapi dan memfokuskan diri pada elemen-elemen yang beragam dan berbagai isu dalam konteks global)

Dengan demikian pembentukan karakter Warganegara Indonesia yang hendak dibentuk dipengaruhi oleh kepentingan dasar hidup berbangsa dan bernegara sehingga mereka menjadi warganegara yang berwibawa dan berkarakter Indonesia. Walaupun demikian adaptasi dengan lingkungan global sukar untuk dibatasi. Di samping karakter warga Negara global perlu disiapkan berbagai saringan dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, warganegara yang berada di alam global disebut dengan warganegara multidimensional. Menurut Cogan dan Derricott (1998) setiap warganegara multidimensional harus memiliki karakter sebagai berikut :

- a) Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global (*the ability to look at and approach problem as a member of global society*)
- b) Kemampuan bekerja sama dengan pihak lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggungjawab atas peran/tugasnya di dalam masyarakat (*the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's rules/duties within society*)
- c) Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya (*the ability to understand, accept, appreciate of tolerate cultural differences*).
- d) Kapasitas berfikir dengan cara yang kritis dan sistematis (*the capacity to think in a critical and systematic way*)
- e) Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan (*the willingness to resolve conflict in a violent manner*)
- f) Keinginan untuk mengubah gaya hidup dari kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan (*the willingness to change one's life style and consumption habits to protect the environment*)

- g) Kemampuan bersikap sensitive dan melindungi HAM misalnya hak kaum perempuan, hak etnis minoritas dan lain-lain (*the ability to be sensitive towards and to defend human rights eg. Rights of women, ethnic minorities and*)
- h) Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional (*the willingness and ability to participate in politic at lokal, nasional and international level*)

Karakteristik warganegara seperti yang tersebut diatas, merupakan hal-hal yang membentuk warganegara yang ideal dan inilah yang menjadi tujuan pendidikan dari *civic education* (pendidikan civic). Pada tingkat Negara internasionalpun pendidikan kewarganegaraan (*Nationalism education*) diakui dan dijalankan, hanya saja hal ini sudah dianggap sebagai pendekatan tradisional (Al Berta, 2005).

4. Pendidikan Character building

Pendidikan mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dalam membentuk character bangsa, pendidikan tersebut dimulai pada tingkat paling dasar yaitu keluarga. Tugas mendidik bukanlah sepenuhnya menjadi tugas guru semata. Di samping itu pendidikan bukan juga tugas sekolah atau kampus, juga dilakukan oleh institusi pemerintah dan swasta, lembaga dan LSM, organisasi bahkan komunitas atau perkumpulan.

Menurut Trimanto, bahwa pendidikan character building dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu :

a. Personal Character Building

Cara ini merupakan pendidikan bersifat individu (perseorangan) dengan menanamkan berbagai nilai dan perilaku yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu dan menjadi ciri khas kepribadiannya. Unsur-unsur Individu meliputi; *pertama*, keimanan/ keyakinan, ini berkaitan dengan agama atau keyakinan yang menjadi unsure pembentuk kecerdasan spiritual (menurut Ary Ginanjar) yang dikenal luas di Republik Indonesia yaitu konsep ESQ. Dengan demikian pendidikan agama menjadi hal yang serius diperhatikan dan perlu direintroduksi pada seluruh jenjang pendidikan mulai dari sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun di Perguruan Tinggi.

Peranan agama dalam pendidikan karakter individu anak bangsa sangat besar, apabila beragama secara baik dan benar (kaffah) akan membuahkan perilaku, etika dan moral yang baik pula. Keimanan menjadi *basic mentality* dalam setiap langkah dan aktivitas anak bangsa. Peranan nilai-nilai agama dalam kehidupan akan membentuk karakter individu dan pada akhirnya akan membentuk karakter bangsa. Inilah dasar yang harus dimiliki oleh bangsa ini.

Apabila anak bangsa ini mempunyai pengamalan agama yang baik, akan wujud kejujuran, sanggup bekerja keras, memiliki kemandirian (seperti yang disampaikan oleh *founding father* Negara ini kata Bung Karno). Hal ini juga sejalan dengan Kapabilitas sistem politik yang diterapkan di Negara Republik Indonesia. Di samping itu pengamalan kearifan lokal juga tidak boleh dikesampingkan, karena kearifan lokal merupakan unsur terpenting dalam mempererat kesatuan dan persatuan bangsa.

b. Community Character Building

Masyarakat (komunitas) Negara ini sangat heterogen (fluralitas), terdiri berbagai agama, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, budaya, pendidikan, sejarah dan sebagainya. Sudah sepatutnya memelihara saling menghormati, memiliki sikap toleransi serta saling bekerja sama dan tolong menolong (gotong royong). Apabila hal tersebut dalam diwujudkan dalam kehidupan ini dengan baik, akan terwujud sebuah masyarakat aman, damai, tenang, rukun dan adil.

c. Nation Character Building

Apabila *personal character building* dan *community character building* sudah berjalan secara efektif dan efisien, maka dalam mewujudkan *nation Character Building* tidak terlalu sulit Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan sendirinya akan terbentuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, Setiap elemen bangsa dengan mudah dan mampu menghayati 4 pilar kenegaraan yaitu *UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam kehidupan bernegara lebih mengedepankan semangat keindonesiaan daripada semanga kelompok/golongan ataupun semangat primordial.

Di samping itu, harus tumbuh rasa senasip dan sepenanggungan, pengalaman kolonialisme bangsa Eropah dan Asia Timur

telah membentuk perasaan senasip dan sepenanggungan, dengan sendirinya secara bahu membahu dan berjuang tegaknya Negara kesatuan republik Indonesia.

5. Pola penguatan wawasan kebangsaan

Wawasan kebangsaan mengandung tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri bangsa dan mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai peljelmaan kepribadiaannya. Dengan demikian bagi bangsa yang berperilaku baik itu merupakan salah satu bentuk pengamalan wawasan kebangsaan yang baik pula. Hal ini sesuai dengan ungkapan bung Karno *Berdaulatlah kamu di bidang politik, berdikarilah kamu di bidang Ekonomi dan berperilakulah kamu dibidang kebudayaan.*

Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita atau falsafah hidup yang diperjuangkan secara sungguh dan dalam waktu yang sangat panjang. Wawasan tersebut merupakan hasil konstruksi dari realitas siosial dan politik (*social and political construct*) mengutip pendapat (Benefit Anderson, 1992). Hal serupa juga disampaikan dalam pidato Presiden Soekarno maupun Mohammad Hatta berkaitan dengan wawasan kebangsaan yang merupakan bagian terpenting dari konstruksi elit politik terhadap bangunan citra bangsa Indonesia. Apapun perbedaan pandangan elit tersebut, perbedaan itu telah membentuk kerangka fikir masyarakat tentang wawasan kebangsaan Indonesia.

Interaksi siosial menghasilkan kohesi siosial yang ampuh, terciptanya masyarakat yang harmonis, Integasi dalam sistem siosial yang terjadi akan mewarnai dan member pengaruh bagaimana sistem budaya (*ideology/ falsafah/pandangan hidup*) dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sub sistem politik dalam bekerja selalu bergandengan tangan dengan sub-sistem ekonomi. Apabila politik tidak sehat maka dengan sendirinya ekonomipun akan mengalami kemandekan. Sistem politik amat mempengaruhi berbagai sistem kenegaraan apalagi yang berkaitan dengan kemampuan sistem politik.

Wawasan kebangsaan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila didukung oleh sistem ekonomi yang mandiri, sistem politik yang berdaulatl, sistem hukum yang

berwibawa, sistem budaya yang berperilaku atau beretika. Kesemuanya menjadi energy positif dalam memperkokohn empat pilar kenegaraan-kebangsaan Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut pola fikir pemahaman kebangsaan sebagai mana disajikan pada Lampiran.

Melihat lampiran tersebut, subsistem politik merupakan prasyarat untuk terwujudnya subsistem ekonomi. Pada sub sistem politik berjalannya sistem demokrasi dengan mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban warga Negara, menghargai perbedaan yang terjadi dalam sebuah Negara.

6. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan *Nation and character building* merupakan kerangka dasar dalam membangun bangsa dan menjadi nasionalisme. Jika tanpa sumber daya manusia tidak memiliki karakter yang kuat dan berkualitas, dengan sendirinya berujung kepada kehancuran dan bobroknya bangsa ini. Kan tetapi sebaliknya jika memiliki karakter bangsa yang kuat secara otomatis wawasan kebangsaan-kenegaraan menjadi kokoh, dengan melakukan *affirmative action* sebagai berikut :

- 1) Pendidikan Civic (*civic education*), pendidikan agama dan Budi pekerti perlu dimasukkan kembali ke kurikulum sekolah, mulai tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi.
- 2) Pendidikan politik perlu tingkatkan semaksimal mungkin terutama makna dan arti kapabilitas sistem politik dipahami secara signifikan..
- 3) Wawasan kebangsaan perlu disosialisasikan kepada masyarakat terutama generasi mudanya, dengan menggunakan berbagai instrumen baik dari institusi pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan tokoh-tokoh agama.
- 4) Memanfaatkan berbagai kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia (misalnya di Provinsi Aceh melibatkan Syariat Islam, gotong royong dan lain seumpamanya), dalam penguatan kebangsaan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Daftar Pustaka

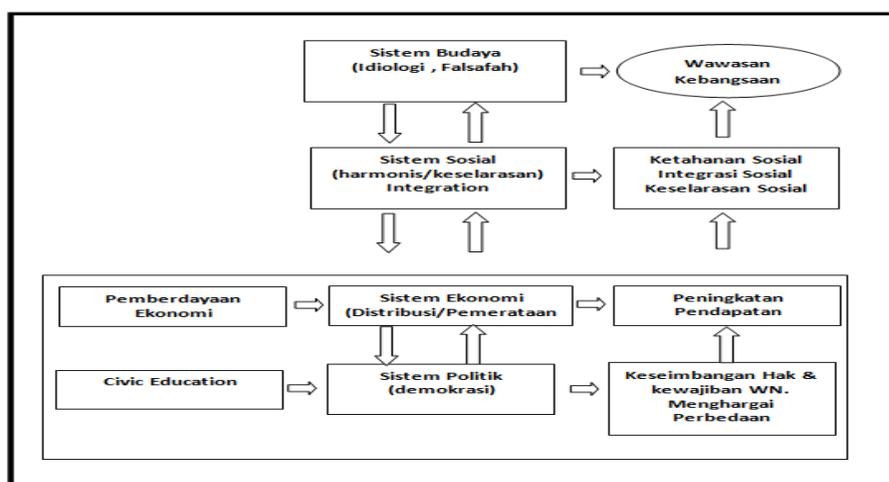
- A.Rahman Ali. 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Ghaha Ilmu
- Arifin Rahman. 1998. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural dan Fungsional*. Surabaya : SIC
- Alberta Schools. 2005. *The Hearth of Thev Matter : Character and Citizenship Education In Alberta Schools*. Canada: Albert.
- Ari Ginanjar Agustian, 1987. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*. Jakarta: ARGA
- Azyurmardi Azra, 2011. Empat Pilar. <http://www.uinjkat.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1932-empat-pilar> (down load 25 Nopember 2012).
- Betty Iriawan Maksudi. 2011. *Sistem Politik Indonesia pemahaman secara teoritik dan empiric*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Benedict. Anderson. 1991. *Imagined Community : Reflections on the Origin and spread of Nationalism*. London : Verso.
- Cogan, J and Derricot, Ray (eds). 1998. *Citizenship Education For 21st Century; setting the contex*. Lonon: Kogan Page.
- Depdikbud.2012. Materi Diklat Prajabatan Golongan III : *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka NKRI*. Jakarta.
- Jurnal Perempuan 2011. *Kearifan Lokal*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Leo Agustiono. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah*. Bandung : Widya Padjadjaran
- Parsons, Talcott. 1951. *Toward a General Of Action*. New York : Harper & Row
- Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudi Silalahi. 2010. Revitalisasi Karakter Bangsa Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Negarawan*. No. 16 tahun 2010, hal 9-33.
- Sri Eddi Swasono, 1992. *Muhammad Hatta : beberapa pokok pikiran*. Jakarta : UI Press
- TAP MPR Nomor V tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional : Upaya memperkokoh Persatuan Bangsa dan Kesatuan Negara.

Riwayat Penulis:

Dr. H. Rasyidin, S.Sos, M.A, Lahir di Gandapura, 06 Mei 1961, Jabatan Akademik: Lektor Kepala. Lulusan SMAN 1 Lhokseumawe (1981), S1 Unimal, Jurusan Ilmu Administrasi Negara (1997), Master dari Universiti Kebangsaan Malaysia (2004), dan Doktor Universiti Kebangsaan Malaysia (2012). Sampai saat ini tercatat sebagai Dosen FISIP Universitas Malikussaleh Lhokseumawe - Aceh.

Lampiran :

POLA PIKIR PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN



Sumber : Parson, Talcott.